

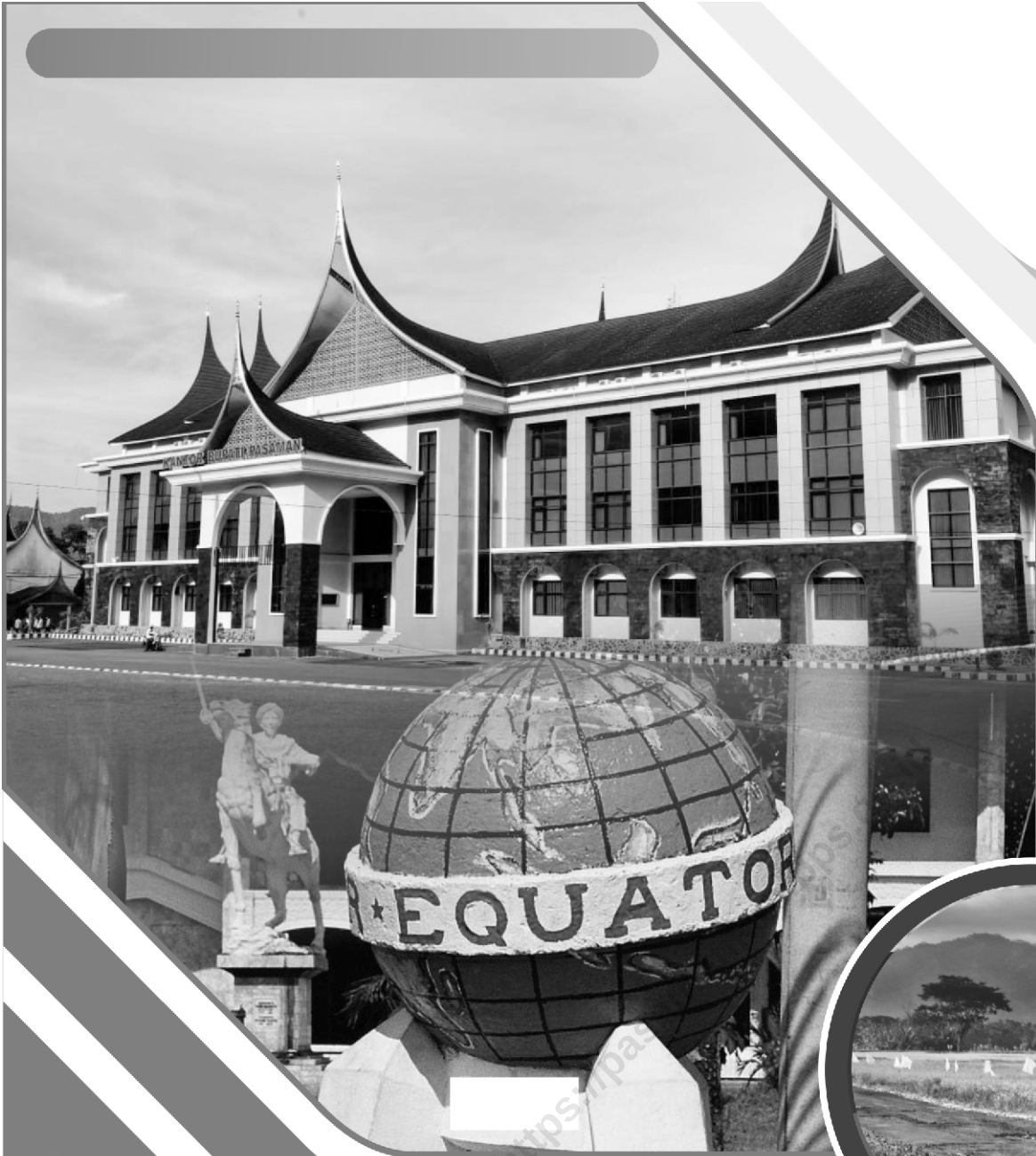


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASAMAN MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN***





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASAMAN MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASAMAN MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISBN : 978-602-5941-37-5
Nomor Publikasi : 13090.2007
Katalog BPS : 9302020.1309

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 61 halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Pasaman

Penyunting :
BPS Kabupaten Pasaman

Gambar Kulit:
BPS Kabupaten Pasaman

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman

Dicetak Oleh:
Percetakan Paresso

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASAMAN
MENURUT PENGELUARAN
2015-2019**

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Aluisius Abrianta, S.ST, MA

Editor : Maira Dwi Putri, SP

Penulis : Firna Stephanie, S.ST

Pengolah Data : Maira Dwi Putri, SP

<https://pasaman.kab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, diantaranya sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, serta kajian ekspor dan impor.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi/ penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/ *Industry*), pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/ *expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/ *income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota tim penyusun publikasi ini sehingga dapat diterbitkan pada waktunya, demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/ perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Lubuk Sikaping, Mei 2020
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN
KEPALA,



ALUISIUS ABRIANTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO.....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	5
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT).....	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT).....	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	16
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	18
2.5 PERUBAHAN INVENTORI.....	20
2.6 EKSPOR-IMPOR.....	23
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PASAMAN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014-2018	25
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN.....	27
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	34
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	37
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	38
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	41
3.2.5 Ekspor Barang dan Jasa	42
3.2.6 Impor Barang dan Jasa	43
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PASAMAN.....	45
4.1 PDRB (NOMINAL).....	47
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	48
V. PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	53
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	29
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	31
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	33
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	34
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	35
Tabel 7	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	36
Tabel 8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	37
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	38
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	39
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	41
Tabel 12	Perkembangan Ekspor Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	42
Tabel 13	Perkembangan Impor Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	44
Tabel 14	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	47
Tabel 15	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Psaman, 2015 - 2019	48

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	28
Gambar 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	30
Gambar 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	30
Gambar 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	32
Gambar 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019	33

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	55
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	56
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	57
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	58
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	59
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	60
Lampiran 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	61
Lampiran 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	62
Lampiran 9	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	63
Lampiran 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Pasaman, 2015 - 2019	64

BAB 1

PENDAHULUAN

PDRB PENGELUARAN

Pengeluaran Akhir
Rumah Tangga
(PK-RT)



1

Pengeluaran Konsumsi
Akhir Lembaga Non Profit
yang Melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT)



2

Pengeluaran
Konsumsi Akhir
Pemerintah (PK-P)



3

Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB)



4

Perubahan Inventori
(PI)



5

Ekspor Barang dan Jasa



6

Impor Barang dan Jasa



7

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimasukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, **PDRB Pengeluaran** juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik regional bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut:

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + \text{GFCF} + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- b. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- e. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- f. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*Cultivated Biological Resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*Military Weapon Systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*Mineral Exploration and Evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*Computer Software and Databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*Entertainment, Literary or Artistic Originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga perekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://pasamankab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

1

PK-RT

SUSENAS/SUSEDA,
SKKRT, SP2010, DATA
SEKUNDER, IHK



PK-LNPRT

SK-LNP, SK-LNPT,
UPDATING DIREKTORI
LNPRT, IHK



3

PK-P

REALISASI APBD
TAHUNAN, STATISTIK
KEUANGAN DAERAH,
OUTPUT BI, GAJI PNS



PMTB

OUTPUT INDUSTRI
KONSTRUKSI,
DATA SEKUNDER,
IHPB



5

PI

LAP KEUANGAN
BUMN/BUMD, IHPB, INDEKS
HARGA IMPLISIT PDRB
INDUSTRI TERPILIH



EKSPOR IMPOR

NET EKSPORT

6



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
2. Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
3. Sensus Penduduk 2010, BPS
4. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
5. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per kapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (adh Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

1. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
2. SK-LNP Triwulanan (SK-LNP), BPS

3. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
4. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (adh Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5 (lima).

Catatan: Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten/kota; b). PK-P Kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Data realisasi APBD Tahunan, Badan Keuangan Daerah
2. Statistik Keuangan Daerah, BPS
3. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
4. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan
5. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
6. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	Kabupaten / Kota
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2. 4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

1. Output industri konstruksi, BPS
2. Nilai impor 2 digit HS, BPS
3. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
4. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
5. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
6. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
7. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas), BPS

- a. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- b. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- c. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta

8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga berlaku/IHPB (T-1)}}{\text{IHPB}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan kesuatu wilayah.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Ekspor keluar provinsi/Kabupaten/kota
2. Impor dari luar provinsi/Kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impordidefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PASAMAN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2015-2019

55,80%

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB Kabupaten Pasaman sebesar 55,80%

4,84 %

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Mencapai 4,84 %



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Pasaman atas dasar harga (adh) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 7,06 persen dari tahun 2018, yakni dari 8.320.784,88 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 8.908.514,90 juta rupiah di tahun 2019. Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatannya, yakni dari 5.894.864,54 juta rupiah (2010=100) menjadi 6.180.211,15 juta rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 4,84 persen.

Perekonomian Kabupaten Pasaman periode 2015 - 2018 tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 5,34 persen (2015); 5,07 persen (2016); 5,08 persen (2017); dan 5,00 persen (2018). Namun, pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Pasaman tumbuh di bawah 5 persen, yaitu 4,84 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di atas 8 persen pada periode 2015-2019. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Pasaman atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 6.505.370,04 juta rupiah (2015); 7.335.785,21 juta rupiah (2016); 7.801.982,13 juta rupiah (2017); 8.320.784,88 juta rupiah (2018); dan 8.908.514,90 juta rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pasaman pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 berikut ini:

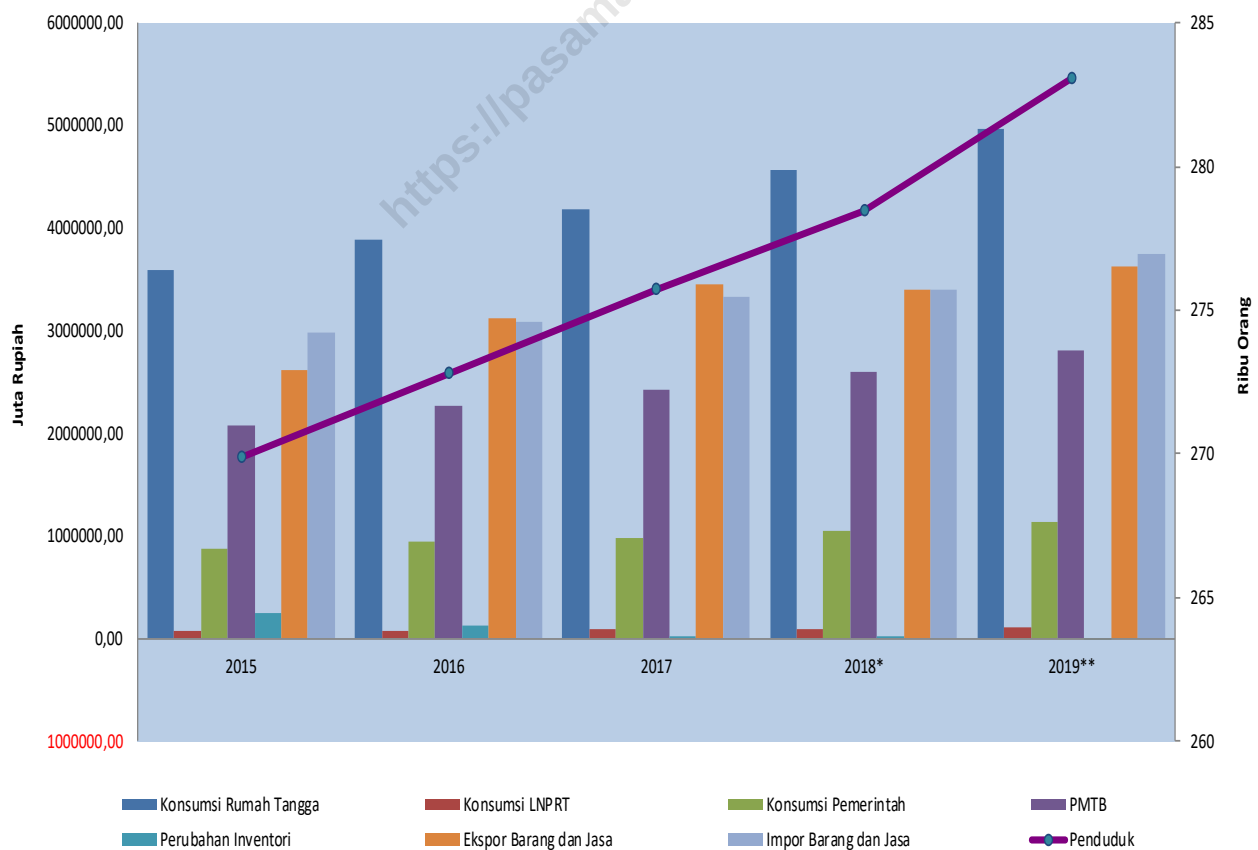
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019

(Juta Rp)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 591 051,35	3 882 848,82	4 188 217,31	4 570 188,84	4 971 023,71
2. Konsumsi LNPRT	75 308,70	82 289,18	84 821,17	92 143,61	108 101,95
3. Konsumsi Pemerintah	872 158,19	940 931,65	976 135,69	1 055 352,86	1 141 285,57
4. PMTB	2 070 738,71	2 268 309,47	2 422 063,50	2 597 202,93	2 810 792,25
5. Perubahan Inventori	254 949,89	119 071,68	3 577,77	4 936,04	(1 543,62)
6. Ekspor	2 615 356,74	3 128 957,90	3 458 714,21	3 403 524,09	3 625 051,06
7. Impor	2 974 193,54	3 086 623,48	3 331 547,51	3 402 563,49	3 746 196,02
PDRB	6 505 370,04	7 335 785,21	7 801 982,13	8 320 784,88	8 908 514,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 – 2019



*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Pasaman pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019

(Juta Rp)

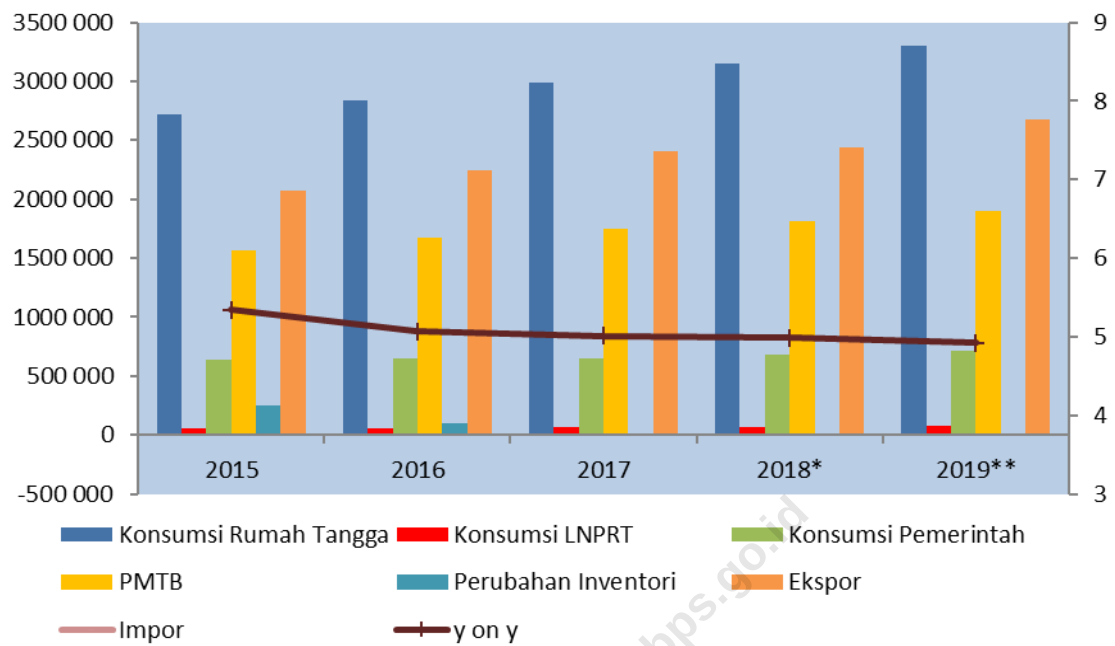
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 717 124,57	2 839 997,17	2 988 681,70	3 146 145,49	3 303 998,05
2. Konsumsi LNPRT	58 977,83	61 729,63	64 156,16	68 127,49	76 918,33
3. Konsumsi Pemerintah	642 690,95	652 021,88	652 021,88	679 320,72	711 927,68
4. PMTB	1 569 393,49	1 676 252,99	1 745 178,59	1 817 734,82	1 899 480,64
5. Perubahan Inventori	251 947,99	96 457,15	2 588,02	3 458,88	(1 079,55)
6. Ekspor	2 067 086,80	2 250 071,82	2 411 632,18	2 438 835,69	2 671 905,14
7. Impor	2 221 901,08	2 233 627,00	2 245 634,93	2 258 758,55	2 482 939,14
PDRB	5 085 320,55	5 342 903,64	5 614 284,67	5 894 864,54	6 180 211,15

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Pasaman meningkat, yakni sebesar 5.085.320,55 juta rupiah (2015); 5.342.903,64 juta rupiah (2016); 5.614.284,67 juta rupiah (2017); 5.894.864,54 juta rupiah (2018); dan 6.180.211,15 juta rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman mengalami perlambatan, yakni dari 5,00 persen pada tahun 2018 menjadi 4,84 persen pada tahun 2019.

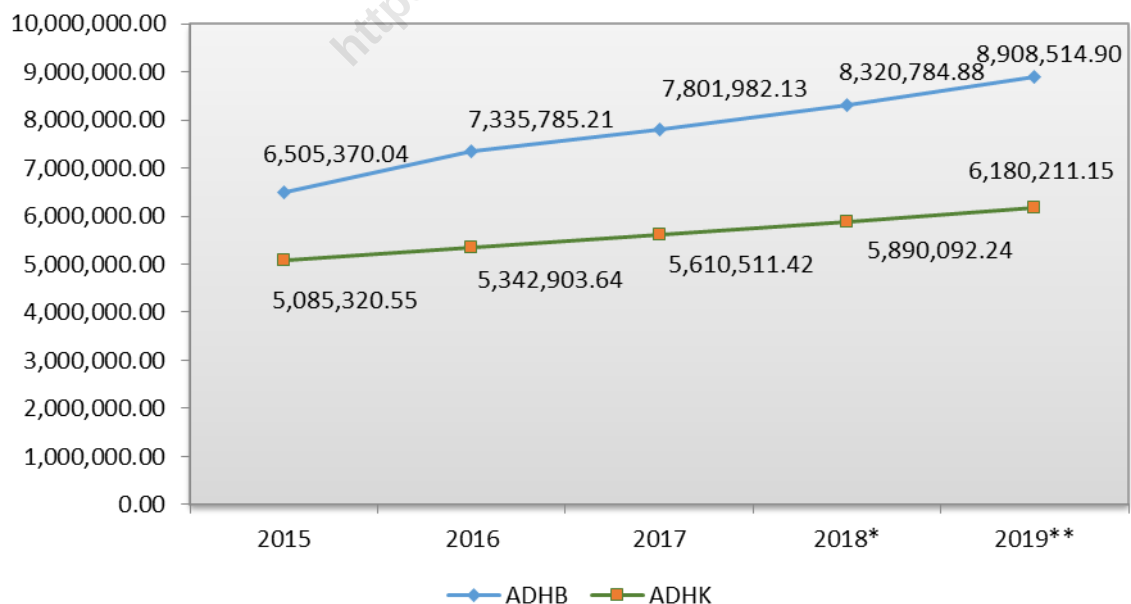
Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015 – 2019



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pasaman, 2015-2019



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Pasaman 2015 – 2019**

(%)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,20	52,93	53,68	54,92	55,80
2. Konsumsi LNPRT	1,16	1,12	1,09	1,11	1,21
3. Konsumsi Pemerintah	13,41	12,83	12,51	12,68	12,81
4. PMTB	31,83	30,92	31,04	31,21	31,55
5. Perubahan Inventori	3,92	1,62	0,05	0,06	(0,02)
6. Ekspor	40,20	42,65	44,33	40,90	40,69
7. Impor	45,72	42,08	42,70	40,89	42,05
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

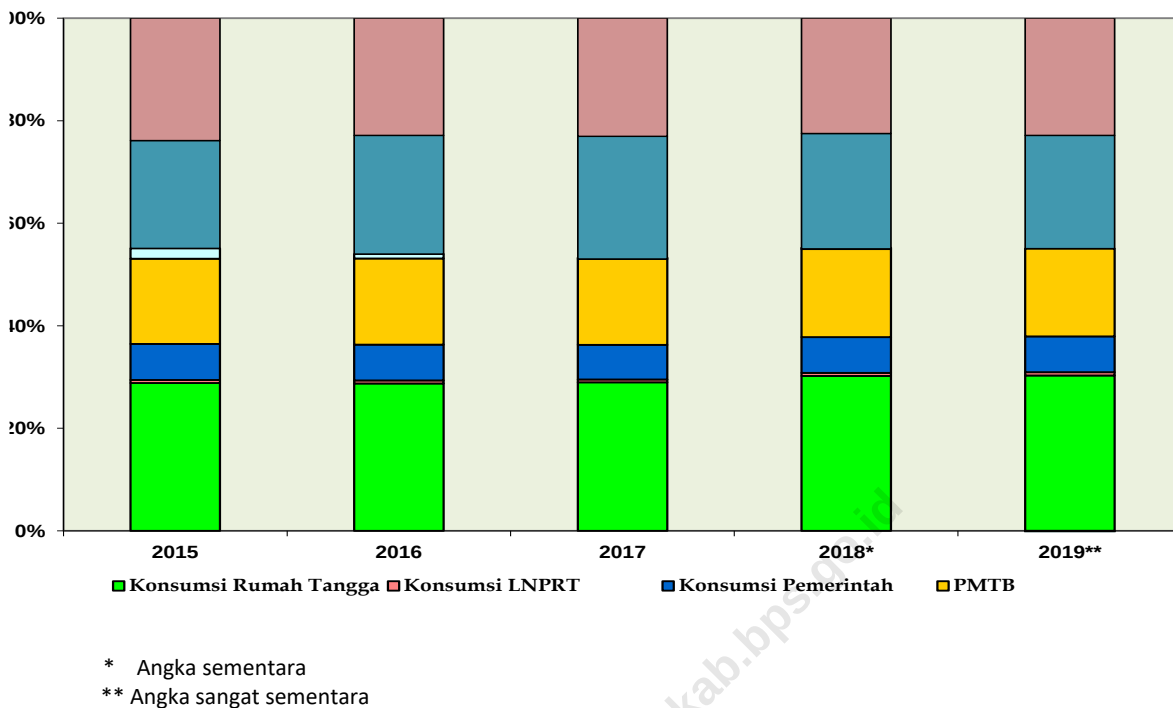
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, sebagian besar PDRB Kabupaten Pasaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30 persen pada periode 2015-2019. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 40 persen pada periode 2015-2019, komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 40-an persen pada 2015-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Gambar 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Pasaman 2015 – 2019**



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 12,51 s.d 13,41 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015-2019, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman cenderung melambat, yakni sebesar 5,34 persen (2015); 5,07 persen (2016) dan 5,08 persen (2017); 5,00 persen (2018); dan 4,84 persen (2019). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019**

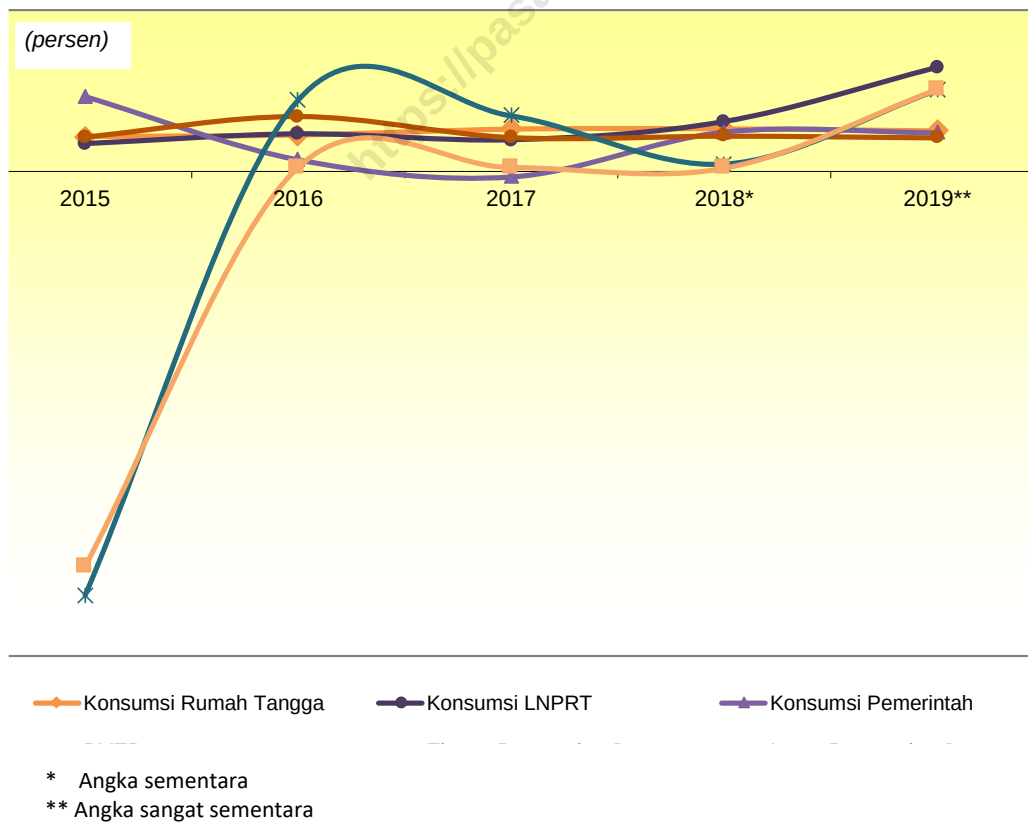
(%)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,33	4,52	5,24	5,27	5,02
2. Konsumsi LNPRT	3,46	4,67	3,93	6,19	12,90
3. Konsumsi Pemerintah	9,28	1,45	(0,67)	4,88	4,80
4. PMTB	4,27	6,81	4,11	4,16	4,50
5. Perubahan Inventori	269,90	(61,72)	(97,32)	33,65	(131,21)
6. Ekspor	(52,48)	8,85	7,18	1,13	9,56
7. Impor	(48,86)	0,53	0,54	0,58	9,92
PDRB	5,34	5,07	5,08	5,00	4,84

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Pasaman, 2015 - 2019**



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 s.d 2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pasaman
2015 – 2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	132,16	136,72	140,14	145,26	150,45
2. Konsumsi LNPRT	127,69	133,31	132,21	135,25	140,54
3. Konsumsi Pemerintah	135,70	144,31	150,71	155,35	160,31
4. PMTB	131,95	135,32	138,79	142,88	147,98
5. Perubahan Inventori	101,19	123,45	138,24	142,71	142,99
6. Ekspor	126,52	139,06	143,42	139,56	135,67
7. Impor	133,86	138,19	148,36	150,64	150,88
PDRB	127,92	137,30	138,97	141,15	144,15

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Pasaman untuk periode 2015 – 2019.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah

⁶ Indeks perkembangan

bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Pasaman, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pasaman maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pasaman, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	3 591 051,35	3 882 848,82	4 188 217,31	4 570 188,84	4 971 023,71
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2 717 124,57	2 839 997,17	2 988 681,70	3 146 145,49	3 303 998,05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	55,20	52,93	53,68	54,92	55,80
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga pertahun (Juta Rp)					
a. ADHB	56,64	60,59	64,66	69,86	75,25
b. ADHK 2010	42,86	44,32	46,14	48,09	50,02
Rata-rata konsumsi per-kapita pertahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	13 305,96	14 233,11	15 189,67	16 411,19	17 677,20
b. ADHK 2010	10 067,79	10 410,39	10 839,24	11 297,56	11 749,18
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,33	4,52	5,24	5,27	5,02
b. Per rumah tangga	3,07	3,40	4,12	4,23	4,00
c. Perkapita	3,17	3,40	4,12	4,23	4,00
Jumlah RT (unit)	63 397	64 082	64 769	65 416	66 058
Jumlah Penduduk	269 883	272 804	275 728	278 480	281 211

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama periode 2015 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 55,20 persen (2015); 52,93 persen (2016); 53,68 persen (2017); 54,92 persen (2018); dan 55,80 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 55,80 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 52,93 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kabupaten Pasaman menghabiskan dana sekitar 56,64 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 60,59 juta rupiah pada 2016; 64,66 juta rupiah pada 2017; 69,86 juta rupiah pada 2018; dan 75,25 juta rupiah pada 2019. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 hingga 4 persen pada periode 2015-2019, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,23 persen.

Kemudian, Pada Tabel 6, konsumsi per kapita secara volume meningkat setiap tahunnya dari 2015-2019 seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, yaitu dari 13,30 juta rupiah pada 2015 hingga 17,68 juta rupiah pada tahun 2019. Akan tetapi, jika dilihat secara riil, pertumbuhannya melambat pada tahun 2019, yaitu dari 4,23 persen di tahun 2018 menjadi 4,00 persen pada tahun 2019. Tabel di bawah ini menggambarkan struktur komponen konsumsi rumah tangga Kabupaten Pasaman tahun 2015-2019, yang mana pertumbuhan setiap komponennya berpengaruh pada pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita.

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Pasaman
2015—2019⁷**

		(%)				
Kelompok Konsumsi		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Makanan, Minuman dan Rokok	47,92	48,02	47,60	48,39	47,63
b.	Pakaian dan Alas Kaki	3,79	3,78	3,77	3,80	3,86
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,64	9,48	9,53	9,44	9,24
d.	Kesehatan dan Pendidikan	7,10	7,29	7,57	7,50	7,66
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21,37	21,25	21,63	21,15	21,34
f.	Hotel dan Restoran	3,71	3,78	3,79	3,81	3,82
g.	Lainnya	6,29	6,13	6,11	5,90	6,45
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara rata-rata dari tahun 2015 s.d 2019, terlihat pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Pasaman, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibanding konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan masing-masing tahun mencapai 47,92 persen (2015); 48,02 persen (2016); 47,60 persen (2017); 48,39 persen (2018); dan 47,63 persen (2019). Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga yang tertinggi pada konsumsi rumah tangga tahun 2019 adalah pada kelompok konsumsi lainnya, yaitu sebesar 15,71 persen. Sedangkan peningkatan harga terendah pada tahun 2019 terjadi pada konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, yaitu sebesar 1,34 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pasaman 2015—2019⁸

		(%)				
Kelompok Konsumsi		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan, Minuman dan Rokok	4,62	3,95	1,76	5,20	2,46
b.	Pakaian dan Alas Kaki	3,83	2,76	1,83	4,27	3,63
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,73	2,61	4,45	3,61	1,34
d.	Kesehatan dan Pendidikan	8,30	9,05	2,68	2,51	4,51
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6,02	1,83	2,70	1,09	3,61
f.	Hotel dan Restoran	5,67	3,97	2,23	3,60	2,27
g.	Lainnya	5,21	3,01	4,77	1,78	15,71

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPR

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya,

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Pasaman, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	75 308,70	82 289,18	84 821,17	92 143,61	108 101,95
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	58 977,83	61 729,63	64 156,16	68 127,49	76 918,33
Proporsi terhadap PDRB	1,16	1,12	1,09	1,11	1,21
(% ADHB)					
Pertumbuhan (ADHK 2010)	3,46	4,67	3,93	6,19	12,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT sebesar 75.308,70 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 82.289,18 juta rupiah (2016), 84.821,17 juta rupiah (2017), 92.143,61 juta rupiah (2018), dan 108.101,95 juta rupiah (2019). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 3,46 persen (2015), 4,67 persen (2016), dan 3,93 persen (2017), 6,19 persen (2018), dan 12,90 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya kegiatan pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif secara serentak sehingga pengeluaran organisasi partai politik meningkat.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif *ekuivalen* dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang

publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pasaman, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	872 158,19	940.931,65	976 135,69	1 055 352,86	1.141 285,57
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	642 690,95	652 021,88	647 682,94	679 320,72	711 927,68
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13,41	12,83	12,51	12,68	12,81
Konsumsi Pemerintah per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3 231,62	3 449,11	3 540,21	3 789,69	4 058,47
b. ADHK 2010	2 381,37	2 390,07	2 348,99	2 439,39	2 531,65
Konsumsi Pemerintah per pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	162,69	200,84	208,84	236,73	257,80
b. ADHK 2010	119,88	139,17	138,57	152,38	160,81
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	9,28	1,45	(0,67)	4,88	4,80
b. Konsumsi per Kapita	8,06	0,37	(1,72)	3,85	3,78
c. Konsumsi per pegawai	5,12	16,09	(0,43)	9,97	5,53
Jumlah Pegawai Pemerintah	5 361	4 685	4 674	4 458	4 427
Jumlah Penduduk	269 883	272 804	275 728	278 480	281 211

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 872.158,19 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 940.931,65 juta rupiah (2016), 976.135,69 juta rupiah (2017), 1.055.352,86 juta rupiah (2018), dan 1.141.285,57 juta rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, yaitu 13,41 persen (2015), 12,83 persen (2016), 12,51 persen (2017), 12,68 persen (2018), dan 12,81 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,51 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,41 persen. Pengeluaran tersebut cenderung didominasi untuk konsumsi kolektif.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2015, konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 3,23 juta rupiah. Nilai ini terus meningkat pada tahun-tahun setelahnya, yaitu menjadi 3,45 juta rupiah (2016); 3,54 juta rupiah (2017); 3,79 juta rupiah (2018) dan 4,06 juta rupiah pada tahun 2019.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, masing-masing senilai 2,38 juta rupiah (2015), 2,39 juta rupiah (2016), 2,35 juta rupiah (2017), 2,44 juta rupiah (2018), dan 2,53 juta rupiah (2019). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Kemudian, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita setiap tahun, yaitu 8,06 persen (2015); 0,37 persen (2016), -1,72 persen (2017), 3,85 persen (2018), dan 3,78 persen (2019).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 162,69 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 200,84 juta rupiah (2016); 208,84 juta rupiah (2017) dan 236,73 juta rupiah (2018); dan 257,80 juta rupiah (2019). Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 dan 2018, masing-masing sebesar 16,09 persen dan 9,97 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (2010), sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang mengalami peningkatan. Namun, pada periode tahun 2016 s.d 2019 jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 4.685 orang (2016); 4.674 orang (2017); 4.458 orang (2018); dan 4.427 orang (2019). Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pegawai yang pensiun. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah tetap mengalami peningkatan pada periode 2016-

2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial bagi rumah tangga.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi untuk total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 9,28 persen. Pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi per kapita juga terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 8,06 persen. Sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,09 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau, pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pasaman, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	2 070 738,71	2 268 309,47	2 422 063,50	2 597 202,93	2 810 792,25
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1 569 393,49	1 676 252,99	1 745 178,59	1 817 734,82	1 899 480,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,83	30,92	31,04	31,21	31,55
Struktur PMTB ⁶					
a. Bangunan (Juta Rp)	1 295 159,55	1 428 700,52	1 543 165,89	1 691 722,39	1 845 592,17
(%)	19,91	19,48	19,78	20,33	20,72
b. Non Bangunan (Juta Rp)	775 579,16	839 608,95	878 897,61	905 480,54	965 200,07
(%)	11,92	11,45	11,27	10,88	10,83
Total PMTB (Juta Rp)	2 070 738,71	2 268 309,47	2 422 063,50	2 597 202,93	2 810 792,25
Pertumbuhan					
Pembentukan Modal Tetap	4,27	6,81	4,11	4,16	4,50

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bruto					
a. Bangunan (Juta Rp)	5,46	7,90	5,84	5,87	5,10
b. Non Bangunan (Juta Rp)	2,34	4,98	1,13	1,06	3,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data Tabel 11 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuatif, yaitu dari 4,27 persen (2015); 6,81 persen (2016); 4,11 persen (2017), 4,16 persen (2018); dan 4,50 persen (2019).

3.2.5. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Pasaman, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 12. Perkembangan Ekspor Kabupaten Pasaman, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	2 615 356,74	3 128 957,90	3 458 714,21	3 403 524,09	3 625 051,06
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2 067 086,80	2 250 071,82	2 411 632,18	2 438 835,69	2 671 905,14
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	40,20	42,65	44,33	40,90	40,69
Pertumbuhan					
Ekspor	(52,48)	8,85	7,18	1,13	9,56

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, berdasarkan atas dasar harga berlaku, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu 2.615.356,74 juta rupiah (2015), 3.128.957,90 juta rupiah (2016), 3.458.714,21 juta rupiah (2017), 3.403.524,09 juta rupiah (2018); dan 3.625.051,06 juta rupiah (2019). Kemudian, pada periode 2015 s.d 2019, proporsi nilai ekspor dalam PDRB terlihat berfluktuatif, yaitu 40,20 persen pada 2015, 42,65 persen pada 2016, 44,33 persen pada 2017, 40,90 persen pada tahun 2018, dan 40,69 persen pada 2019.

Pertumbuhan riil total ekspor mengalami fluktuasi, yaitu -52,48 persen (2015); 8,85 persen (2016), 7,18 persen (2017), 1,13 persen (2018), dan 9,56 persen (2019).

3.2.6. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Pasaman. Sehingga, untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Pasaman di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pasaman terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Pasaman berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2015 s.d 2019. Pada tahun 2015, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 2.974.193,54 juta rupiah, kemudian di tahun 2016 menjadi 3.086.623,48 juta rupiah, 3.331.547,51 juta rupiah di tahun 2017, 3.402.563,49 juta rupiah di tahun 2018, dan 3.746.196,02 juta rupiah pada tahun 2019. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2015 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 45,72 persen. Pada tahun 2016 kontribusi impor barang dan jasa turun menjadi 42,08 persen. Kemudian, 42,70 persen pada tahun 2017, 40,89 persen pada tahun 2018, dan 42,05 persen pada tahun 2019.

Tabel 13. Perkembangan Impor Kabupaten Pasaman, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Juta Rp)	2 974 193,54	3 086 623,48	3 331 547,51	3 402 563,49	3 746 196,02
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2 221 901,08	2 233 627,00	2 245 634,93	2 258 758,55	2 482 939,14
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	45,72	42,08	42,70	40,89	42,05

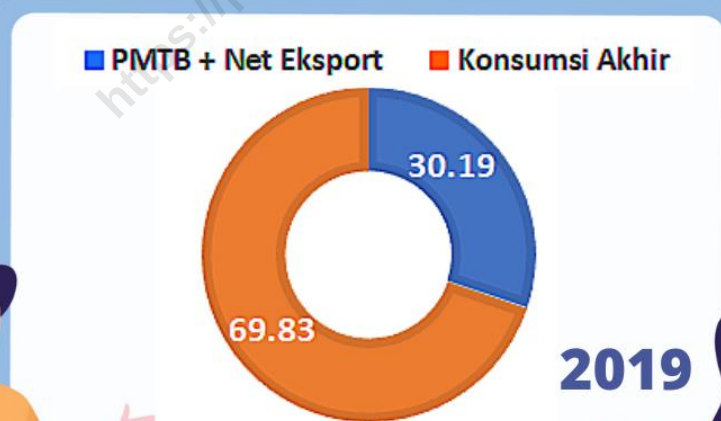
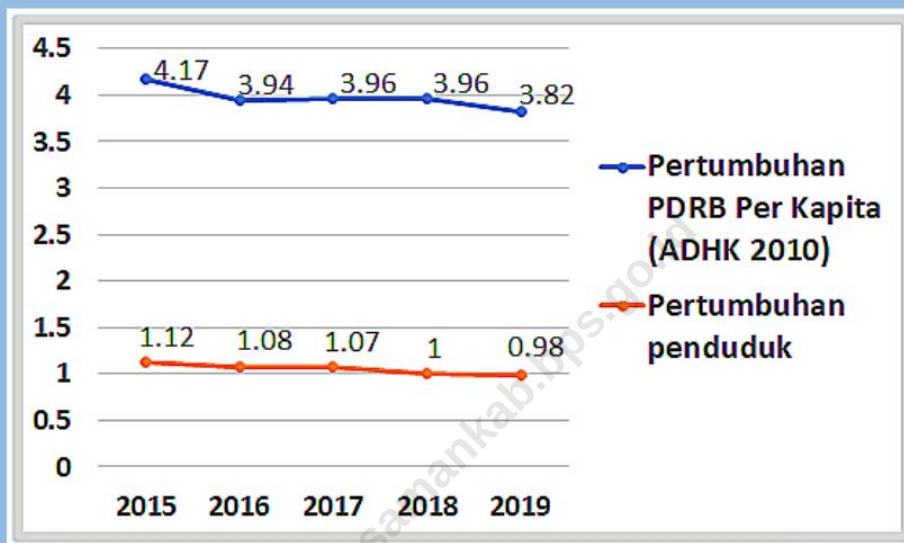
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://pasamankab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PASAMAN



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Pasaman, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pasaman, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
a. ADHB	6 505 370,04	7 335 785,21	7 801 982,13	8 320 784,88	8 908 514,90
b. ADHK 2010	5 085 320,55	5 342 903,64	5 614 284,67	5 894 864,54	6 180 211,15
PDRB Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	24 104,41	26 890,31	28 295,94	29 879,29	31 679,11
b. ADHK 2010	18 842,69	19 585,14	20 361,68	21 168,00	21 977,13
Pertumbuhan					
PDRB Per Kapita ADHK 2010	4,17	3,94	3,96	3,96	3,82
Jumlah Penduduk	269 883	272 804	275 728	278 480	281 211
Pertumbuhan penduduk	1,12	1,08	1,07	1,00	0,98

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Pasaman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 14), seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Pasaman rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita secara "rill" berkisar pada 3,82 - 4,17 persen selama tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat berfluktuasi, yaitu 4,17 persen tahun 2015; 3,94 persen pada tahun 2016; 3,96 persen pada tahun 2017; 3,96 persen pada tahun 2018; dan 3,82 persen pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan penduduk cenderung melambat dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu 1,12 persen pada 2015; 1,08 persen pada 2016; 1,07 persen pada 2017; 1,00 persen pada 2018, dan 0,98 persen pada tahun 2019.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pasaman, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah Tangga	3 591 051,35	3 882 848,82	4 188 217,31	4 570 188,84	4 971 023,71
b. LNPRT	75 308,70	82 289,18	84 821,17	92 143,61	108 101,95
c. Pemerintah	872 158,19	940 931,65	976 135,69	1 055 352,86	1 141 285,57
Jumlah	4 538 518,25	4 906 069,65	5 249 174,16	5 717 685,31	6 220 411,23
PDRB ADHB (Juta Rp)	6 505 370,04	7 335 785,21	7 801 982,13	8 320 784,88	8 908 514,90
Proporsi	69,77	66,88	67,28	68,72	69,83

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 15 menggambarkan bahwa sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir, dimana lebih dari 66 persen proporsi pengeluaran total rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah terhadap PDRB. Proporsi konsumsi akhir domestik terhadap PDRB berfluktuatif setiap tahunnya pada selang 2015-2019, yaitu 69,77 persen pada 2015; 66,88 persen pada 2016; 67,28 persen pada 2017; dan 68,72 persen pada 2018, dan 69,83 persen pada 2019.

BAB V PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pasaman pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasaman terhadap ekonomi luar daerah.

Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Pasaman
2015 - 2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 591 051,35	3 882 848,82	4 188 217,31	4 570 188,84	4 971 023,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75 308,70	82 289,18	84 821,17	92 143,61	108 101,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	872 158,19	940 931,65	976 135,69	1 055 352,86	1 141 285,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 070 738,71	2 268 309,47	2 422 063,50	2 597 202,93	2 810 792,25
5. Perubahan Inventori	254 949,89	119 071,68	3 577,77	4 936,04	- 1 543,62
6. Net Ekspor Antar Daerah	- 358 836,80	42 334,42	127 166,70	960,60	- 121 144,96
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 505 370,04	7 335 785,21	7 801 982,13	8 320 784,88	8 908 514,90

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Pasaman
2015 - 2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2 717 124,57	2 839 997,17	2 988 681,70	3 146 145,49	3 303 998,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	58 977,83	61 729,63	64 156,16	68 127,49	76 918,33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	642 690,95	652 021,88	647 682,94	679 320,72	711 927,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 569 393,49	1 676 252,99	1 745 178,59	1 817 734,82	1 899 480,64
5. Perubahan Inventori	251 947,99	96 457,15	2 588,02	3 458,88	- 1 079,55
6. Net Ekspor Antar Daerah	- 154 814,28	16 444,81	165 997,25	180 077,14	188 966,00
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5 085 320,55	5 342 903,64	5 614 284,67	5 894 864,54	6 180 211,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Pasaman
2015 - 2019

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,20	52,93	53,68	54,92	55,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,12	1,09	1,11	1,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,41	12,83	12,51	12,68	12,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,83	30,92	31,04	31,21	31,55
5. Perubahan Inventori	3,92	1,62	0,05	0,06	-0,02
6. Net Ekspor Antar Daerah	(5,52)	0,58	1,63	0,01	-1,36
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Pasaman
2015 - 2019

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,33	4,52	5,24	5,27	5,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,46	4,67	3,93	6,19	12,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,28	1,45	(0,67)	4,88	4,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,27	6,81	4,11	4,16	4,50
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5,34	5,07	5,08	5,00	4,84

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran
Pasaman
2015 - 2019

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,18	3,45	2,50	3,66	3,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,49	4,40	(0,82)	2,30	3,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,77	6,34	4,44	3,08	3,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	2,56	2,56	2,95	3,57
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,77	7,33	1,21	1,57	2,12

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. *Profil Ekonomi Rumah Tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macro Economic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No. 4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN***

Jl. Jendral Sudirman No. 66 Telp (0753) 20062
Telp/Fax : (0753) 20914

Homepage : <http://www.pasamankab.bps.go.id>, Email : bps1309@bps.go.id

ISBN 978-602-5941-37-5



9 786025 941375